HUBUNGAN ANTARA STATUS PTNBH DENGAN MINAT MAHASISWA DI INDONESIA TAHUN 2008–2023

Eko Nuryaddin K.I.[1*], Riatu Mariatul Qibthiyyah[2]
[1,2]Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia
[*]Email: eko.nki@setneg.go.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hubungan perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dengan minat mahasiswa di Indonesia yang diproksikan melalui jumlah mahasiswa terdaftar. Penelitian menggunakan data panel 20 PTNBH periode 2008–2023 dan diestimasi dengan model Fixed Effects (FE) dengan Driscoll–Kraay standard errors. Hasil estimasi menunjukkan bahwa status PTNBH berasosiasi positif dengan jumlah mahasiswa terdaftar, dengan koefisien sekitar 6.710 mahasiswa dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99% ($p < 0{,}01$). Namun, setelah interaksi wilayah dimasukkan, estimasi asosiasi status PTNBH pada PTNBH di luar Pulau Jawa menurun menjadi 1.409 mahasiswa dan tidak signifikan ($p > 0{,}10$). Koefisien interaksi status PTNBH × Jawa sebesar 9.484 mahasiswa dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99% ($p < 0{,}01$), yang menunjukkan bahwa asosiasi pada PTNBH di Pulau Jawa lebih besar dibandingkan dengan PTNBH di luar Pulau Jawa. Berdasarkan pengujian kombinasi linear antara koefisien status PTNBH dan koefisien interaksi status PTNBH × Jawa, estimasi asosiasi status PTNBH pada PTNBH di Pulau Jawa mencapai sekitar 10.892 mahasiswa dan signifikan secara statistik ($p < 0{,}001$). Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara otonomi kelembagaan dan jumlah mahasiswa terdaftar berbeda menurut konteks wilayah.

Kata Kunci : jumlah mahasiswa terdaftar, kebijakan pendidikan tinggi, otonomi perguruan tinggi, PTNBH.

ABSTRACT

This study examines the relationship between the transformation of Public Universities (PTN) into Autonomous Public Universities (PTNBH) and student enrollment in Indonesia. Using panel data from 20 PTNBH during 2008–2023, the analysis applies a Fixed Effects (FE) model with Driscoll–Kraay standard errors. The estimation results show that PTNBH status is positively associated with an increase of approximately 6,710 enrolled students and is statistically significant at the 99% confidence level ($p < 0.01$). However, after the regional interaction term is introduced, the coefficient on PTNBH status declines to 1,409 students and becomes statistically insignificant ($p > 0.10$). The interaction coefficient between PTNBH status and location in Java is 9,484 students and significant at the 99% confidence level ($p < 0.01$), indicating a stronger association for PTNBH institutions in Java than for those outside Java. Based on a linear combination test of the PTNBH status coefficient and its interaction with Java, the estimated association for PTNBH institutions in Java is approximately 10,892 students and statistically significant ($p < 0.001$). These findings indicate that the relationship between institutional autonomy and student enrollment varies across regional contexts.

Keywords *: student enrollment, higher education autonomy, higher education policy, autonomous public universities (PTNBH).*

Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mobilitas sosial, dan daya saing nasional. Zhu et al. (2018) menunjukkan bahwa pendidikan tinggi berkaitan positif dengan pertumbuhan ekonomi regional di Tiongkok. Dalam konteks tersebut, reformasi tata kelola perguruan tinggi menjadi penting agar institusi pendidikan tinggi memiliki kapasitas yang lebih adaptif dalam merespons perubahan lingkungan akademik, sosial, dan ekonomi. Di Indonesia, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), yang memberikan otonomi lebih luas kepada perguruan tinggi negeri dalam pengelolaan akademik dan nonakademik.

Otonomi institusi tidak hanya ditentukan oleh perubahan status formal, tetapi juga oleh bagaimana hubungan antara negara dan perguruan tinggi dibentuk dalam tata kelola pendidikan tinggi (Lackner, 2024). Secara ideal, otonomi perguruan tinggi negeri diharapkan dapat memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan daya saing, dan mendukung perluasan akses pendidikan tinggi. Namun, dalam praktiknya, kebijakan PTNBH memunculkan dilema mengenai keterjangkauan biaya pendidikan, efektivitas pendanaan, dan ketimpangan akses antarwilayah. Ketimpangan tidak hanya dipahami sebagai persoalan karakteristik individu mahasiswa, tetapi juga sebagai persoalan sistemik yang berkaitan dengan perluasan akses, distribusi sumber daya, dan konteks kelembagaan. Kajian Deem et al. (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan tinggi dapat dibaca pada level makro, pada level institusi, maupun pada level individu.

Secara kelembagaan, hingga tahun 2025 terdapat 23 PTNBH di bawah Kemdiktisaintek dan satu PTNBH di bawah Kementerian Agama (Hasibuan et al., 2025; Kementerian Pendidikan Tinggi, 2025; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia, 2016). Sebagai gambaran struktur pendidikan tinggi negeri di Indonesia, terdapat 127 PTN di bawah Kemdiktisaintek dan 59 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di bawah Kementerian Agama (Badan Pusat Statistik, n.d., 2025). Sementara terkait jumlah mahasiswa, berdasarkan data Statistik Pendidikan Tinggi (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) dan Laporan Kinerja PTNBH (lihat Lampiran A), tercatat adanya peningkatan rata-rata jumlah mahasiswa terdaftar setelah perubahan status PTN menjadi PTNBH, dari 33.092 orang sebelum perubahan status menjadi 40.201 orang setelah menjadi PTNBH. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan status kelembagaan PTN berpotensi berkaitan dengan minat mahasiswa untuk mendaftar, yang dalam penelitian ini diproksikan melalui jumlah mahasiswa terdaftar.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan tinggi berkaitan dengan pembiayaan dan kebijakan pendanaan, kapasitas institusi, kondisi sosial ekonomi, serta dukungan bagi kelompok berstatus sosial ekonomi rendah (Buckner & Zhang, 2021; Delaney & Marcotte, 2024; Fadhil & Sabic-El-Rayess, 2021; Hao et al., 2023; Pham & Le, 2025; Purnastuti & Izzaty, 2016; Salmi & Hauptman, 2006; Wanti et al., 2023; Zhang & Zhu, 2018). Dalam konteks Indonesia, peningkatan jumlah perguruan tinggi dan pembiayaan pendidikan tinggi tidak selalu berjalan searah dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar maupun angka partisipasi kasar perguruan tinggi (Habibah, et al., 2019; Yubilianto, 2020). Sementara itu, kajian mengenai PTNBH lebih banyak membahas tata kelola, pembiayaan, dan kelembagaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan status PTN menjadi PTNBH perlu dikaji tidak hanya sebagai reformasi administratif, tetapi juga dalam kaitannya dengan dinamika jumlah mahasiswa terdaftar dan kondisi wilayah tempat perguruan tinggi beroperasi.

Secara konseptual, penelitian ini bertolak dari pendapat Hanushek (1986) mengenai fungsi produksi pendidikan yang memandang jumlah mahasiswa terdaftar sebagai output yang dipengaruhi oleh input institusional dan sosial ekonomi, seperti status kelembagaan, pendanaan, kapasitas dosen, dan kondisi ekonomi wilayah. Pendekatan *enrollment management* (Hossler & Kalsbeek, 2013) juga menekankan bahwa jumlah mahasiswa terdaftar berkaitan dengan kualitas institusi, biaya

pendidikan, dan dukungan pembiayaan. Dalam konteks pendidikan tinggi publik, perspektif keuangan publik menunjukkan pentingnya peran negara dalam menjaga akses dan keterjangkauan pendidikan tinggi (Mankiw, 2018; Musgrave & Musgrave, 1989). Berdasarkan kerangka tersebut, perubahan status PTN menjadi PTNBH dapat dipahami sebagai kebijakan kelembagaan yang berkaitan dengan jumlah mahasiswa terdaftar dikaitkan dengan faktor institusional dan sosial ekonomi wilayah.

Meskipun demikian, bukti empiris mengenai hubungan perubahan status PTN menjadi PTNBH dengan jumlah mahasiswa terdaftar masih terbatas. Penelitian terdahulu belum banyak menganalisis perubahan jumlah mahasiswa sebelum dan setelah berstatus PTNBH dengan menggunakan data panel jangka panjang. Selain itu, faktor institusional dan sosial ekonomi wilayah, seperti pendanaan, jumlah dosen dan tenaga kependidikan, angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi provinsi, jumlah penduduk, dan PDRB per kapita, belum banyak dianalisis secara terpadu dalam satu model analisis pada tingkat PTNBH. Perbedaan hubungan antara status PTNBH dan jumlah mahasiswa terdaftar berdasarkan lokasi perguruan tinggi di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa juga masih memerlukan pengujian empiris. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis data panel 20 PTNBH selama periode 2008–2023 dengan mengintegrasikan karakteristik institusional, kondisi sosial ekonomi wilayah, dan interaksi antara status PTNBH dan lokasi di Pulau Jawa.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis asosiasi antara perubahan status PTN menjadi PTNBH dan jumlah mahasiswa terdaftar serta menguji apakah asosiasi tersebut berbeda antara PTNBH di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Penelitian ini berkontribusi pada tiga aspek empiris dan kebijakan. Pertama, penelitian ini memberikan bukti empiris berbasis data panel jangka panjang mengenai hubungan perubahan status 20 PTN menjadi PTNBH dengan jumlah mahasiswa terdaftar selama periode 2008–2023. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan status kelembagaan, faktor institusional, dan sosial ekonomi wilayah dalam satu kerangka analisis, sehingga hubungan status PTNBH dengan jumlah mahasiswa terdaftar dapat ditelaah setelah memperhitungkan variasi karakteristik perguruan tinggi dan konteks wilayah. Ketiga, penelitian ini menguji heterogenitas hubungan antara status PTNBH dan jumlah mahasiswa terdaftar dengan lokasi di Pulau Jawa. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada cakupan empiris, integrasi faktor institusional dan wilayah, serta pengujian heterogenitas regional. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya pembahasan mengenai otonomi perguruan tinggi, ketimpangan wilayah, dan kebijakan akses pendidikan tinggi di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel. Unit analisis adalah 20 PTNBH di Indonesia selama periode 2008–2023. Empat PTNBH, yaitu UIII, UT, UNJ, dan UNSRI, tidak dimasukkan dalam analisis karena tidak memenuhi persyaratan keterbandingan sebelum dan setelah perubahan status dalam periode penelitian. UIII dikecualikan karena sejak awal berdiri telah berstatus PTNBH sehingga tidak memiliki periode pengamatan sebelum PTNBH, UT dikecualikan karena menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, memiliki cakupan layanan nasional, dan memiliki jumlah mahasiswa ratusan ribu orang sehingga karakteristiknya tidak sebanding dengan PTNBH berbasis kampus yang memiliki mahasiswa puluhan ribu orang. UNJ dan UNSRI dikecualikan karena perubahan status menjadi PTNBH terjadi pada akhir periode penelitian sehingga data pengamatan setelah perubahan status tidak memadai. Pengecualian tersebut dilakukan untuk menjaga keterbandingan karakteristik unit analisis dan ketersediaan periode pengamatan sebelum dan setelah perubahan status PTNBH.

Penelitian ini menggunakan jumlah mahasiswa terdaftar sebagai variabel dependen dan proksi minat mahasiswa. Variabel independen utama adalah status PTNBH yang diukur dengan variabel dummy, yaitu bernilai 0 sebelum PTN berstatus PTNBH dan bernilai 1 sejak berstatus PTNBH. Variabel kontrol terdiri atas faktor institusional, yaitu pendanaan APBN, pendanaan non-APBN, jumlah dosen, dan jumlah tenaga kependidikan, serta faktor

sosial ekonomi, yaitu APK PT provinsi, jumlah penduduk, dan PDRB per kapita harga berlaku.

Seluruh variabel kuantitatif tersebut digunakan dalam bentuk level. Transformasi logaritmik tidak diterapkan karena penelitian ini mengestimasi perubahan absolut jumlah mahasiswa terdaftar yang berhubungan dengan perubahan setiap variabel penjelas. Dengan demikian, koefisien dapat diinterpretasikan dalam satuan asli data. Meskipun pendanaan APBN, pendanaan non-APBN, dan PDRB per kapita harga berlaku memiliki rentang nilai yang relatif besar, perbedaan skala tidak dengan sendirinya menyebabkan estimator *fixed effects* menjadi bias. Oleh karena itu, bentuk level dipertahankan agar sesuai dengan tujuan estimasi dan menjaga keterbandingan antarspesifikasi model. Berdasarkan variabel-variabel tersebut, model empiris penelitian dirumuskan sebagai berikut.

$$Student\ Enrollment_{it} = \beta_0 + \beta_1 Status\ PTNBH_{it} + \beta_2 APBN_{it} + \beta_3 Non-APBN_{it} + \beta_4 Jumlah\ Dosen_{it} + \beta_5 Jumlah\ Tendik_{it} + \beta_6 APK\ PT\ Provinsi_{it} + \beta_7 Jumlah\ Penduduk_{it} + \beta_8 PDRB\ Per\ Kapita\ HB_{it} + u_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Dalam persamaan tersebut, i menunjukkan PTNBH, t menunjukkan tahun pengamatan, u_i merepresentasikan efek khusus PTNBH yang tidak teramati dan bersifat tetap sepanjang waktu, sedangkan ε_{it} merupakan komponen galat. Definisi operasional, cara pengukuran, skala, bentuk, satuan, periode ketersediaan, dan sumber data setiap variabel disajikan pada Tabel 1A dan Tabel 1B.

Tabel 1A. Definisi Operasional, Pengukuran, Skala, dan Satuan Variabel

No.	Variabel	Definisi dan Pengukuran	Skala dan Bentuk	Satuan
1.	Jumlah Mahasiswa Terdaftar	Jumlah mahasiswa PTNBH ke-i pada tahun t; proksi minat mahasiswa	Rasio; Level	Orang
2.	Status PTNBH	Status kelembagaan PTN ke-i pada tahun t; bernilai 0 sebelum perubahan status dan 1 sejak berstatus PTNBH	Nominal; Dummy	0 dan 1
3.	APBN	Pendanaan PTNBH ke-i pada tahun t dari APBN	Rasio; Level	Rupiah
4.	Non-APBN	Pendanaan PTNBH ke-i pada tahun t dari selain APBN	Rasio; Level	Rupiah
5.	Jumlah Dosen	Jumlah dosen PTNBH ke-i pada tahun t	Rasio; Level	Orang
6.	Jumlah Tendik	Jumlah tenaga kependidikan PTNBH ke-i pada tahun t	Rasio; Level	Orang
7.	APK PT Provinsi	APK PT pada provinsi tempat PTNBH ke-i berlokasi pada tahun t	Rasio; Level	Persen
8.	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk pada provinsi tempat PTNBH ke-i berlokasi pada tahun t	Rasio; Level	Orang
9.	PDRB Per Kapita HB	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada provinsi tempat PTNBH ke-i berlokasi pada tahun t	Rasio; Level	Rupiah

Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi, Laporan Kinerja PTNBH, Laporan Keuangan PTNBH, dan BPS (telah diolah kembali)

Tabel 1B. Periode Ketersediaan dan Sumber Data Variabel

No.	Variabel	Periode Ketersediaan Data	Sumber Data
1.	Jumlah Mahasiswa Terdaftar	2009–2023	Statistik Pendidikan Tinggi dan Laporan Kinerja PTNBH

No.	Variabel	Periode Ketersediaan Data	Sumber Data
2.	Status PTNBH	2008–2023	Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja PTNBH
3.	APBN	2008–2023	Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja PTNBH
4.	Non-APBN	2008–2023	Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja PTNBH
5.	Jumlah Dosen	2009–2023	Statistik Pendidikan Tinggi dan Laporan Kinerja PTNBH
6.	Jumlah Tendik	2008–2023	Laporan Kinerja PTNBH
7.	APK PT Provinsi	2015–2023	BPS
8.	Jumlah Penduduk	2010–2023	BPS
9.	PDRB Per Kapita HB	2012–2023	BPS

Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi, Laporan Kinerja PTNBH, Laporan Keuangan PTNBH, dan BPS (telah diolah kembali)

Data yang digunakan bersifat tidak seimbang (*unbalanced panel*) karena adanya perbedaan periode ketersediaan data variabel sekunder dengan rentang antara 2008–2023, terdiri atas 111 observasi dari 20 PTNBH dengan jumlah observasi efektif per PTNBH antara 1–9 tahun.

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui uji F, uji Lagrange Multiplier Breusch–Pagan, dan uji Hausman. Uji F menghasilkan $F(19,83) = 30{,}295$ dengan $p < 0{,}001$, yang menunjukkan bahwa model *fixed effects* lebih sesuai daripada *pooled* OLS. Uji Lagrange Multiplier Breusch–Pagan menghasilkan $\chi^2(1) = 103{,}400$ dengan $p < 0{,}001$, sehingga model *random effects* lebih sesuai daripada *pooled* OLS. Selanjutnya, uji Hausman menghasilkan $\chi^2(8) = 37{,}268$ dengan $p < 0{,}001$, sehingga hipotesis nol ditolak dan model *fixed effects* dipilih dibandingkan *random effects*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model *fixed effects* lebih sesuai dan selanjutnya digunakan sebagai model utama.

Model *fixed effects* digunakan untuk mengontrol heterogenitas yang tidak teramati antar-PTNBH dan relatif tetap sepanjang waktu. Hasil Modified Wald Test menunjukkan adanya heteroskedastisitas pada model *fixed effects* standar ($p < 0{,}001$), sedangkan Uji Wooldridge menunjukkan adanya autokorelasi serial ($p < 0{,}001$). Sementara itu, pengujian dependensi lintang (*cross-sectional dependence*/CSD) dilakukan menggunakan beberapa pendekatan guna mengantisipasi struktur data panel yang tidak seimbang (*unbalanced panel*). Hasil pengujian dependensi lintas unit tidak sepenuhnya konsisten. Uji Pesaran CD menghasilkan nilai tidak signifikan (z = -0,898, p = 0,369) akibat hilangnya 45% pasangan entitas dalam kalkulasi irisan waktu sedangkan Uji *Bias-Corrected Scaled LM* secara kuat menolak hipotesis nol (z = 4,645, p < 0,001). Keberadaan korelasi kontemporer antar-entitas ini didukung oleh nilai rata-rata korelasi residual absolut ($|\rho| = 0{,}621$) yang sangat tinggi. Meskipun demikian, hasil ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena 45% pasangan entitas memiliki irisan periode waktu yang terlalu pendek. Menghadapi hasil diagnostik yang tidak konvergen ini, penggunaan Driscoll-Kraay standard error dipilih sebagai langkah pendekatan konservatif untuk mengurangi sensitivitas inferensi terhadap heteroskedastisitas, autokorelasi serial, dan kemungkinan korelasi lintas unit.

Analisis utama mengestimasi hubungan perubahan status PTN menjadi PTNBH dengan jumlah mahasiswa terdaftar setelah memperhitungkan faktor institusional dan faktor sosial ekonomi. Selain itu, untuk mengidentifikasi kemungkinan perbedaan hubungan antarwilayah, model tambahan mempertimbangkan interaksi antara status PTNBH dan lokasi PTNBH di Pulau Jawa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Temuan Deskriptif

Tabel 2. Deskripsi Data Statistik Jumlah Mahasiswa Terdaftar PTNBH, Status PTNBH, Variabel Kontrol Institusi, dan Variabel Kontrol Sosio-Ekonomi

Descriptive Statistics

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Mhs Sblm PTNBH	94	33092.287	10322.958	14070	72312

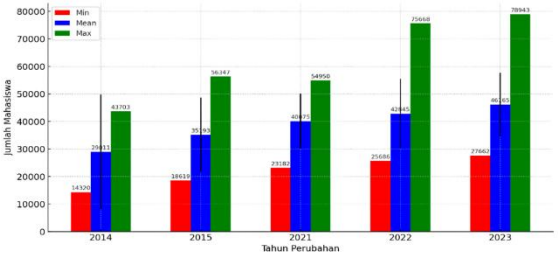
Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Mhs Stlh PTNBH	105	40201.476	11861.842	14320	78943
Total	199	36843.367	11688.347	14070	78943
Status PTNBH	234	.504	.501	0	1
Variable Kontrol Institusi					
APBN	200	5.955e+11	3.130e+11	1.703e+11	2.099e+12
Non-APBN	200	5.959e+11	6.445e+11	0	2.732e+12
Jumlah Dosen	188	1580.319	596.223	841	4555
Jumlah Tendik	135	1485.467	1077.434	404	5505
Variable Kontrol Sosio-Ekonomi					
APK PT Provinsi	178	34.781	14.406	19.28	75.59
Jumlah Penduduk	223	27396.829	17534.395	3552.5	49860.3
PDRB Per Kapita HB	219	53101.589	46381.756	21744.88	322615.13

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Tinggi, Laporan Kinerja PTNBH, dan Laporan Keuangan PTNBH (telah diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata jumlah mahasiswa terdaftar meningkat dari 33.092 orang sebelum perubahan status menjadi PTNBH menjadi 40.201 orang setelah menjadi PTNBH. Secara keseluruhan, rata-rata jumlah mahasiswa terdaftar mencapai 36.843 orang, dengan rentang antara 14.070 hingga 78.943 orang. Temuan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa setelah perubahan status, meskipun terdapat variasi yang cukup besar antarperguruan tinggi.

Pada variabel institusional, rata-rata pendanaan APBN PTNBH sebanyak Rp595,5 miliar, sedangkan rata-rata pendanaan non-APBN berada pada tingkat yang hampir sama. Namun, pendanaan non-APBN memiliki variasi yang lebih besar, dengan simpangan baku sekitar Rp645 miliar. Rata-rata jumlah dosen tercatat 1.580 orang dan rata-rata jumlah tenaga kependidikan 1.485 orang. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas pendanaan dan sumber daya antar-PTNBH cukup beragam.

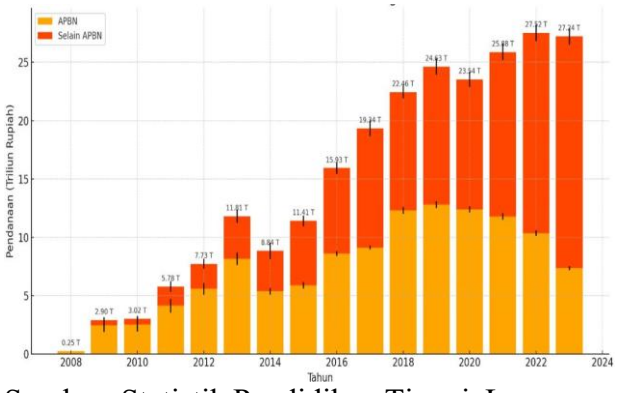
Lebih lanjut, pola jumlah mahasiswa terdaftar serta pendanaan APBN dan non-APBN PTNBH ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi dan Laporan Kinerja PTNBH (telah diolah kembali)

Gambar 1. Jumlah Mahasiswa Terdaftar Berdasarkan Tahun Perubahan Status PTNBH

Gambar 1 menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar setelah perubahan status PTN menjadi PTNBH. Secara rata-rata, jumlah mahasiswa meningkat dari 33.092 orang sebelum menjadi PTNBH menjadi 40.201 orang setelah menjadi PTNBH, atau naik sekitar 21,5 persen. Meskipun demikian, jumlah mahasiswa antar-PTNBH tetap bervariasi, dengan perguruan tinggi berbentuk universitas cenderung memiliki jumlah mahasiswa lebih besar dibandingkan institut.



Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi, Laporan Kinerja PTNBH, dan Laporan Keuangan PTNBH (telah diolah kembali)

Gambar 2. Pendanaan APBN dan Non-APBN

Gambar 2 menunjukkan variasi pendanaan APBN dan non-APBN antar-PTNBH. Pendanaan APBN cenderung lebih seragam, sedangkan pendanaan non-APBN lebih bervariasi. Sebelum kebijakan PTNBH berlaku pada 2014, pendanaan PTN didominasi oleh APBN, sedangkan setelah perubahan status, proporsi pendanaan non-APBN meningkat dan mendekati APBN.

Dari sisi wilayah, PTNBH di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara indikator sosial ekonomi seperti APK PT provinsi, jumlah penduduk, dan PDRB per kapita HB juga bervariasi antarprovinsi. Kondisi ini menjadi konteks penting dalam membaca hasil estimasi regresi, khususnya pada pengujian interaksi antara status PTNBH dan Dummy wilayah Jawa.

3.2. Temuan Regresi

Tabel 3. Hasil Regresi FE dengan Driscoll-Kraay Standard Errors (Variabel Dependen: Jumlah Mahasiswa Terdaftar)

VARIABLES	Model 1	Model 2	Model 3
Status_PTNBH	8,921***	6,710***	1,409
	(1,481)	(1,675)	(1,442)
Status PTNBH * Dummy Jawa			9,484***
			(1,050)
APBN		-9.55e-09**	-8.68e-09**
		(3.45e-09)	(2.94e-09)
Non-APBN		-7.10e-09**	-6.54e-09**
		(2.65e-09)	(2.43e-09)
Jumlah_Dosen	2.423	2.637	2.516
	(2.658)	(3.054)	(2.903)
Jumlah_Tendik	0.0617	-0.0265	0.738
	(1.053)	(0.963)	(0.665)
APK_PT_Provinsi	-667.8**	-493.4***	-553.3***
	(240.0)	(137.4)	(163.7)
Jumlah_Penduduk	2.376**	2.311***	1.854**
	(0.722)	(0.482)	(0.759)
PDRB_Per_Kapita_HB	0.222	0.365**	0.411*
	(0.121)	(0.147)	(0.178)
Constant	-27,426	-27,831*	-17,872
	(17,730)	(12,391)	(20,473)
Observations	114	111	111
Number of groups	20	20	20
(within) R-squared	0.5570	0.6058	0.6484

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Catatan: Pada Model 3, estimasi asosiasi status PTNBH pada PTNBH di Pulau Jawa dihitung sebagai penjumlahan koefisien Status_PTNBH dan koefisien interaksi Status_PTNBH × Dummy Jawa. Hasil penjumlahan sekitar 10.892 mahasiswa dan signifikan secara statistik ($p < 0{,}001$). Signifikansi diuji menggunakan kombinasi linear dengan matriks kovarians Driscoll–Kraay.

Berdasarkan hasil regresi FE dengan Driscoll-Kraay Standard Errors, variabel Status_PTNBH berasosiasi positif dengan Jumlah Mahasiswa Terdaftar pada ketiga model, tetapi hanya signifikan pada Model 1 dan Model 2. Pada Model 1, koefisien Status_PTNBH sebesar 8.921 dan signifikan positif pada tingkat kepercayaan 99% ($p < 0{,}01$), yang menunjukkan hubungan positif antara perubahan status PTN menjadi PTNBH dan jumlah mahasiswa terdaftar. Setelah variabel kontrol APBN dan non-APBN dimasukkan pada Model 2, koefisien Status_PTNBH menurun menjadi 6.710, tetapi tetap signifikan pada tingkat kepercayaan 99% ($p < 0{,}01$).

Pada Model 3, setelah interaksi antara Status PTNBH dan lokasi PTN dimasukkan, koefisien Status_PTNBH turun menjadi 1.409 dan tidak lagi signifikan ($p > 0{,}1$), merepresentasikan hubungan status PTNBH dengan jumlah mahasiswa terdaftar pada PTNBH di luar Pulau Jawa. Sementara itu, koefisien interaksi Status_PTNBH × Dummy Jawa sebesar 9.484 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99% ($p < 0{,}01$). Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan status PTNBH dengan jumlah mahasiswa terdaftar pada PTNBH di Pulau Jawa lebih besar sekitar 9.484 mahasiswa dibandingkan dengan PTNBH di luar Jawa. Lebih lanjut, hasil pengujian kombinasi linear menunjukkan bahwa hubungan total status PTNBH pada perguruan tinggi di Pulau Jawa adalah sekitar 10.892 mahasiswa dan signifikan secara statistik $[\chi^2(1) = 43{,}285;\ p < 0{,}001]$. Namun, temuan tersebut merupakan perbedaan asosiasi antarwilayah dan tidak dengan sendirinya menunjukkan pengaruh kausal lokasi Pulau Jawa.

Jumlah observasi menurun dari 114 pada Model 1 menjadi 111 pada Model 2 dan Model 3 karena penambahan variabel pendanaan APBN dan non-APBN membatasi sampel pada observasi yang memiliki data lebih lengkap dalam panel yang tidak seimbang.

Variabel APBN dan non-APBN tidak disertakan pada Model 1 karena model tersebut diposisikan sebagai model dasar untuk melihat terlebih dahulu hubungan antara Status_PTNBH dan Jumlah Mahasiswa Terdaftar. Pada Model 2 dan Model 3, pendanaan APBN maupun non-APBN berasosiasi negatif dengan Jumlah Mahasiswa Terdaftar pada tingkat kepercayaan 95% ($p < 0{,}05$). Pada Model 2, koefisien APBN sebesar -9,55e-09 dan non-APBN sebesar -7,10e-09. Pola ini konsisten pada Model 3. Koefisien ini menunjukkan adanya hubungan negatif dalam model, tetapi tidak serta-merta berarti bahwa

peningkatan pendanaan secara kausal menurunkan jumlah mahasiswa terdaftar. Kemungkinan endogeneity, arah hubungan terbalik, perbedaan waktu realisasi anggaran, serta perbedaan fungsi dan alokasi pendanaan belum dapat dipisahkan sepenuhnya dalam estimasi ini.

Variabel Jumlah Dosen berkoefisien positif pada ketiga model, tetapi tidak signifikan secara statistik. Demikian pula, Jumlah_Tendik tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan jumlah mahasiswa terdaftar.

Pada variabel sosial ekonomi, variabel APK PT provinsi berasosiasi signifikan negatif pada seluruh model. Namun, koefisien ini perlu ditafsirkan secara hati-hati karena APK PT mengukur partisipasi pendidikan tinggi secara agregat pada tingkat provinsi, sedangkan variabel dependen mengukur jumlah mahasiswa pada satu PTNBH.

Variabel Jumlah Penduduk berasosiasi signifikan positif pada seluruh model. Sementara itu, variabel PDRB Per Kapita HB berasosiasi positif, tetapi hanya signifikan pada Model 2 dan Model 3.

Secara keseluruhan, hasil regresi menunjukkan bahwa perubahan status PTN menjadi PTNBH berasosiasi positif dengan jumlah mahasiswa terdaftar. Namun, setelah dimasukkan dimensi wilayah, hubungan tersebut tampak lebih kuat pada PTNBH yang berada di Pulau Jawa.

3.3. Pembahasan

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status PTN menjadi PTNBH berasosiasi positif dengan jumlah mahasiswa terdaftar. Namun, hubungan tersebut tidak seragam ketika konteks wilayah diperhitungkan. Karena penelitian ini menggunakan data observasional, hasil tersebut menunjukkan pola hubungan kondisional setelah mengontrol variabel dalam model dan tidak membuktikan bahwa perubahan status PTNBH secara langsung menyebabkan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara otonomi perguruan tinggi dan jumlah mahasiswa terdaftar dapat berkaitan pula dengan variasi kondisi institusional dan sosial ekonomi.

Temuan tersebut sejalan secara konseptual dengan perspektif fungsi produksi pendidikan (Hanushek, 1986), yang menekankan bahwa berbagai karakteristik institusi dan sumber daya pendidikan dapat berkaitan dengan output pendidikan. Dalam penelitian ini, status PTNBH dan kapasitas institusi diposisikan sebagai input yang berkaitan dengan jumlah mahasiswa terdaftar. Dalam konteks Indonesia, temuan ini juga konsisten dengan penelitian Ikmah & Yulianto (2025) yang menyimpulkan bahwa otonomi universitas berkaitan dengan performa perguruan tinggi. Sementara, PTNBH juga memiliki otonomi pengelolaan akademik dan nonakademik yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk kelembagaan PTN lainnya (Fachriansyah & Sulastri, 2020).

Namun, ketika interaksi status PTNBH dan lokasi di Pulau Jawa dimasukkan ke dalam model, asosiasi positif tersebut tampak lebih kuat pada PTNBH yang berada di Pulau Jawa. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara otonomi kelembagaan dan jumlah mahasiswa terdaftar tidak berlangsung secara seragam antarwilayah. Namun, hasil ini tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari konsentrasi historis PTNBH di Pulau Jawa. Sejumlah PTNBH di Pulau Jawa telah memiliki skala mahasiswa, reputasi, keragaman program studi, jaringan transportasi, dan ekosistem pendidikan tinggi yang relatif lebih kuat sebelum memperoleh status PTNBH. Oleh karena itu, koefisien interaksi Jawa dapat mencerminkan kombinasi status PTNBH, kapasitas institusional, dan keuntungan aglomerasi pendidikan tinggi, bukan karena pengaruh lokasi Pulau Jawa secara kausal. Sebaliknya, PTNBH di luar Pulau Jawa kemungkinan menghadapi keterbatasan struktural yang membuat otonomi kelembagaan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar. Temuan bahwa hubungan antara status PTNBH dan jumlah mahasiswa terdaftar tampak lebih kuat di Pulau Jawa sejalan dengan penelitian Deem et al. (2022) yang menunjukkan bahwa ekspansi pendidikan tinggi tidak otomatis menghilangkan ketimpangan, karena akses pendidikan tinggi tetap dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Ini sejalan pula dengan temuan Simson (2021) di tujuh negara Afrika yang menyimpulkan adanya ketimpangan regional dalam akses pendidikan tinggi dengan pusat-pusat wilayah tertentu cenderung menikmati keuntungan akses yang

lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain. Pengaruh konteks wilayah terhadap akses dan mobilitas mahasiswa juga terlihat di Amerika Serikat, Italia, dan Inggris, yang menunjukkan bahwa disparitas teritorial dapat membentuk pola pendidikan tinggi secara signifikan (Flanagan & Doyle, 2024; Priulla et al., 2025; White & Lee, 2020).

Temuan lain yang penting adalah hubungan negatif antara pendanaan APBN dan non-APBN dengan jumlah mahasiswa terdaftar pada model yang memasukkan variabel pendanaan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pendanaan tidak otomatis berhubungan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar. Temuan ini sejalan dengan Zhang & Zhu (2018) serta Salmi dan Hauptman (2006) yang menekankan pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran dalam pendidikan tinggi. Meski demikian, temuan ini tidak menyimpulkan bahwa pendanaan secara kausal menurunkan jumlah mahasiswa terdaftar. Hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai asosiasi dalam model, mengingat pendanaan sangat mungkin berkaitan pula dengan dinamika kelembagaan, prioritas kebijakan, dan kondisi masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, arah hubungan dapat berlangsung sebaliknya, yaitu perguruan tinggi dengan kebutuhan pembiayaan lebih besar dapat menerima pendanaan yang lebih tinggi. Ini sesuai dengan penelitian Delaney & Marcotte (2024) yang menyimpulkan bahwa hubungan antara pembiayaan dan mahasiswa terdaftar dapat berinteraksi dengan karakteristik institusi dan konteks kebijakan yang lebih luas, seperti saat pandemi COVID-19 (Whatley & Castiello-Gutiérrez, 2022).

Pada sisi lain, tidak signifikannya koefisien jumlah dosen dan tenaga kependidikan menunjukkan bahwa penelitian ini belum menemukan bukti statistik yang memadai mengenai asosiasi kedua variabel tersebut dengan jumlah mahasiswa terdaftar. Hasil ini tidak berarti bahwa sumber daya manusia tidak relevan karena hubungannya mungkin bergantung pada rasio dosen–mahasiswa, komposisi bidang studi, kualitas tenaga pengajar, kebijakan penerimaan, dan kapasitas program studi yang belum tercakup dalam model.

Untuk faktor sosial ekonomi, hubungan negatif APK PT provinsi dengan jumlah mahasiswa terdaftar di PTNBH menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pendidikan tinggi secara agregat pada tingkat provinsi tidak selalu terkonsentrasi pada PTNBH. Dengan demikian, asosiasi negatif tersebut tidak berarti bahwa peningkatan partisipasi pendidikan tinggi menurunkan jumlah mahasiswa PTNBH, tetapi dapat mencerminkan penyebaran mahasiswa ke PTN non-PTNBH, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi di luar provinsi. Temuan ini sejalan dengan Habibah et al. (2019) yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perguruan tinggi tidak selalu berjalan searah dengan peningkatan jumlah mahasiswa pada institusi tertentu. Dalam konteks Indonesia, hasil ini juga dapat mencerminkan keterbatasan daya tampung PTNBH dan konsentrasi persebarannya yang belum merata.

Sebaliknya, asosiasi positif jumlah penduduk dan PDRB per kapita harga berlaku dengan jumlah mahasiswa terdaftar menunjukkan bahwa faktor demografis dan kapasitas ekonomi daerah memiliki asosiasi positif dalam pendidikan tinggi. Dengan hubungan asosiatif, wilayah dengan jumlah penduduk lebih besar memiliki basis calon mahasiswa yang lebih luas, sedangkan wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengakses pendidikan tinggi. Temuan ini sejalan dengan Hao et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi daerah berkaitan dengan partisipasi pendidikan tinggi. Hasil ini menegaskan bahwa hubungan antara reformasi kelembagaan perguruan tinggi dan jumlah mahasiswa terdaftar perlu dipahami dalam konteks sosial ekonomi wilayah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan status PTNBH dengan jumlah mahasiswa terdaftar tidak hanya berasosiasi dengan perubahan status kelembagaan itu sendiri, tetapi juga dengan ketimpangan geografis dan sosial ekonomi. Penguatan kapasitas PTNBH di luar Pulau Jawa, dukungan terhadap daya tampung dan keterjangkauan pendidikan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah tetap diperlukan agar otonomi perguruan tinggi berjalan searah dengan tujuan pemerataan akses. Hal ini sejalan dengan relasi antara otonomi perguruan tinggi, regulasi negara, dan tujuan publik pendidikan

tinggi yang menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan perlu dibaca dalam konteks kebijakan nasional yang lebih luas (Marginson & Yang, 2024).

Terakhir, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan jumlah mahasiswa terdaftar sebagai proksi minat mahasiswa, sehingga aspek preferensi individual calon mahasiswa belum dapat diamati secara langsung. Kedua, desain penelitian berbasis data panel observasional memungkinkan pengamatan hubungan antarvariabel setelah mengontrol heterogenitas tetap antar-PTNBH, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan hubungan kausal secara definitif. Ketiga, struktur panel yang tidak seimbang dan terbatasnya periode pengamatan yang tumpang tindih antarinstitusi dapat memengaruhi presisi estimasi serta hasil pengujian dependensi lintas unit. Keempat, keterbatasan data membuat sejumlah faktor yang secara teoretis relevan, seperti daya tampung, uang kuliah tunggal (UKT), jumlah program studi, reputasi institusi, dan data pendaftar, belum tercakup dalam analisis. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran empiris yang penting mengenai hubungan antara perubahan status kelembagaan, konteks wilayah, dan variasi jumlah mahasiswa terdaftar pada PTNBH di Indonesia.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status PTN menjadi PTNBH berasosiasi positif dengan jumlah mahasiswa terdaftar. Pada model utama, status PTNBH berasosiasi dengan peningkatan sekitar 6.710 mahasiswa dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen. Namun, asosiasi tersebut berbeda menurut wilayah. Pada PTNBH di luar Pulau Jawa, koefisien status PTNBH sebesar 1.409 mahasiswa dan tidak signifikan, sedangkan estimasi asosiasi status PTNBH pada PTNBH di Pulau Jawa mencapai sekitar 10.892 mahasiswa dan signifikan secara statistik. Di antara variabel kontrol, jumlah penduduk dan PDRB per kapita berasosiasi positif, sedangkan APK PT provinsi serta pendanaan APBN dan non-APBN berasosiasi negatif dengan jumlah mahasiswa terdaftar. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan tidak menunjukkan asosiasi yang signifikan. Seluruh temuan tersebut merupakan asosiasi kondisional dalam model dan tidak menunjukkan hubungan kausal.

Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan status kelembagaan saja belum cukup untuk mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi. Kebijakan afirmatif bagi PTNBH di luar Pulau Jawa dapat diarahkan pada penguatan daya tampung, pengembangan program studi, dan keterjangkauan pendidikan. Evaluasi kebijakan pendanaan juga perlu mempertimbangkan kontribusinya terhadap perluasan akses dan kapasitas penerimaan mahasiswa, bukan hanya besaran pendanaan. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel daya tampung, uang kuliah tunggal (UKT), jumlah dan komposisi program studi, reputasi institusi, serta jumlah pendaftar, dan menggunakan pendekatan kuasi-eksperimental untuk mengidentifikasi hubungan kausal secara lebih kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pembimbing dan Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, atas dukungan selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyediakan akses data yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir, terima kasih kepada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia atas dukungan pendanaan selama masa studi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Jumlah Perguruan Tinggi, Dosen, dan Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Agama Menurut Provinsi, 2025*. Retrieved April 1, 2026, from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZG5GNFRUZHdiRWN3YlRGSGF6QXdaVXRPTVZSQlFUMDkjMw==/jumlah-perguruan-tinggi-sup-1--sup---dosen--dan-mahasiswa--negeri-dan-swasta--di-bawah-kementerian-agama-menurut-provinsi--2023.html?year=2025

Badan Pusat Statistik. (2023a). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi*. https://www.bps.go.id/indicator/28/1443/2/

angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html

Badan Pusat Statistik. (2023b). *Penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk menurut provinsi*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMyMwMDAw/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi.html?year=2023

Badan Pusat Statistik. (2023c). *Produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku menurut provinsi (ribu rupiah)*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YWtoQlRVZzNiMU5qU1VOSlRFeFZiRTR4VDJOTVVUMDkjMw%3D%3D/produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi--ribu-rupiah-2022.html?year=2023

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024. Badan Pusat Statistik*. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024

Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah Perguruan Tinggi, Dosen, dan Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2025*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/Y21kVGRHNXZVMEl3S3pCRlIyMHJRbnB1WkVZemR6MDkjMyMwMDAw/jumlah-perguruan-tinggi-sup-1--sup---dosen--dan-mahasiswa-negeri-dan-swasta--di-bawah-kementerian-riset--teknologi-dan-pendidikan-tinggi-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi.html?year=2025

Buckner, E., & Zhang, Y. (2021). The quantity-quality tradeoff: a cross-national, longitudinal analysis of national student-faculty ratios in higher education. *Higher Education*, *82*(1), 39–60. https://doi.org/10.1007/s10734-020-00621-3

Deem, R., Case, J. M., & Nokkala, T. (2022). Researching inequality in higher education: tracing changing conceptions and approaches over fifty years. *Higher Education*, *84*(6), 1245–1265. https://doi.org/10.1007/s10734-022-00922-9

Delaney, T., & Marcotte, D. E. (2024). The Cost of Public Higher Education and College Enrollment. *The Journal of Higher Education*, *95*(4), 496–525. https://doi.org/10.1080/00221546.2023.2216610

Fachriansyah, K., & Sulastri, E. (2020). Developing Legal-Entity Higher Education Institution (Perguruan Tinggi Negeri – Badan Hukum) as Centre of Excellence. *Bappenas Working Papers*, *3*(2), 199–217. https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.71

Fadhil, I., & Sabic-El-Rayess, A. (2021). Providing Equity of Access to Higher Education in Indonesia: A Policy Evaluation. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 57–75. https://doi.org/10.23917/ijolae.v3i1.10376

Flanagan, C. J., & Doyle, W. R. (2024). Measuring Geographic Opportunity for Higher Education in US Metropolitan Areas. *Higher Education Policy*. https://doi.org/10.1057/s41307-024-00381-0

Habibah, S., Putra, Y. P., & Putra, Y. M. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi perguruan tinggi pada 32 provinsi di Indonesia tahun 2013–2016. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, *1*(1), 20. https://doi.org/10.33827/akurasi2019.vol1.iss1.art46

Hanushek, E. A. (1986). The economics of schooling: Production and efficiency in public schools. *Journal of Economic Literature*, *24*(3), 1141–1177. https://hanushek.stanford.edu/publications/economics-schooling-production-and-efficiency-public-schools

Hao, Z., Liao, X., & Qiu, B. (2023). *Research on the Relationship between Education Financial Investment and Higher Education Gross Enrollment Ratio* (pp.

205–215). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-126-5_25

Hasibuan, R. P. S., Nasution, F. N., Bukit, R. B., & Sibarani, R. (2025). What drives financial management in Indonesia state universities with legal entity status (PTN BH)? Evidence from internal oversight units. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, *23*(11), 364–387. https://doi.org/10.52152/801827

Hossler, D., & Kalsbeek, D. (2013). Enrollment Management and Managing Enrollments: Revisiting the Context for Institutional Strategy. *Strategic Enrollment Management Quarterly*, *1*(1), 5–25. https://doi.org/10.1002/sem3.20002

Ikmah, S. F., & Yulianto, A. (2025). University Autonomy and Performance in Indonesia: An Agency Theory Approach. *Educational Management*, *14*(1), 23–32. https://doi.org/10.15294/eduman.v14i1.32037

Kementerian Pendidikan Tinggi, S. dan T. (2025). *Kemdiktisaintek Pacu Kampus Indonesia Jadi World Class University*. https://kemdiktisaintek.go.id/news/article/kemdiktisaintek-pacu-kampus-indonesia-jadi-world-class-university

Lackner, E. J. (2024). Agreements between the state and higher education institutions–how do they matter for institutional autonomy? *Studies in Higher Education*, *49*(6), 1082–1094. https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2258901

Mankiw, N. G. (2018). *Pengantar ekonomi mikro* (C. Sungkono & Tim Editor Penerbit Salemba, Trans.; 7th ed.). Penerbit Salemba Empat.

Marginson, S., & Yang, L. (2024). Has the public good of higher education been emptied out? The case of England. *Higher Education*, *88*(1), 297–319. https://doi.org/10.1007/s10734-023-01117-6

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill Book Company.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (2020). *Statistik pendidikan tinggi tahun 2020*. https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/publikasi

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (2021). *Statistik pendidikan tinggi tahun 2021*. https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/publikasi

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (2022). *Statistik pendidikan tinggi tahun 2022*. https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/publikasi

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (2023). *Statistik pendidikan tinggi tahun 2023*. https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/publikasi

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (2024). *Statistik pendidikan tinggi tahun 2024*. https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/publikasi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia, Pub. L. 57 (2016). https://peraturan.bpk.go.id/Details/40961/perpres-no-57-tahun-2016

Pham, P.-T., & Le, T. T. H. (2025). Unveiling key determinants of higher education expenditure in Vietnam: an adaptive LASSO approach in Tobit regression analysis. *Journal of Applied Research in Higher Education*, *17*(2), 833–851. https://doi.org/10.1108/JARHE-06-2023-0263

Priulla, A., Miaci, E., & Panichella, N. (2025). Social selection in student mobility: The interplay of origin, achievement and track in the Italian North-South divide. *Research in Social Stratification and Mobility*, *100*. https://doi.org/10.1016/j.rssm.2025.101105

Purnastuti, L., & Izzaty, R. E. (2016). Access and Equity in Higher Education in Indonesia. In *Widening Higher Education Participation* (pp. 119–134). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100213-1.00008-1

Salmi, J., & Hauptman, A. M. (2006). *Innovations in tertiary education financing: A comparative evaluation of allocation mechanisms*. https://documents1.worldbank.org/curated/en/965151468314986713/pdf/383240EWPSno401TertiaryEd1Financing.pdf

Simson, R. (2021). Regional inequality in university attainment in seven African countries since 1960. *International Journal*

of Educational Development, *84*, 102427. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102427

Wanti, M., Wesselink, R., Biemans, H., & den Brok, P. (2023). The role of social factors in access to and equity in higher education for students with low socioeconomic status: A case study from Indonesia. *Equity in Education & Society*, *2*(1), 43–60. https://doi.org/10.1177/27526461221140570

Whatley, M., & Castiello-Gutiérrez, S. (2022). Balancing finances, politics, and public health: international student enrollment and reopening plans at US higher education institutions amid the COVID-19 pandemic. *Higher Education*, *84*(2), 299–320. https://doi.org/10.1007/s10734-021-00768-7

White, P. M., & Lee, D. M. (2020). Geographic Inequalities and Access to Higher Education: Is the Proximity to Higher Education Institution Associated with the Probability of Attendance in England? *Research in Higher Education*, *61*(7), 825–848. https://doi.org/10.1007/s11162-019-09563-x

Yubilianto. (2020). Return to education and financial value of investment in higher education in Indonesia. *Journal of Economic Structures*, *9*(1). https://doi.org/10.1186/s40008-020-00193-6

Zhang, S., & Zhu, H. (2018). An Empirical Study of the Factors Influencing the Structure of Tertiary Education Expenditures. *International Journal Of Social Science and Education Research*, *1*(05), 73–81. https://ijosser.org/download/IJOSSER-1-5-73-81.pdf

Zhu, T.-T., Peng, H.-R., & Zhang, Y.-J. (2018). The Influence of Higher Education Development on Economic Growth: Evidence from Central China. *Higher Education Policy*, *31*(2), 139–157. https://doi.org/10.1057/s41307-017-0047-7